
Tata Kelola Kolaborasi Pembangunan Literasi Masyarakat Melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) di Kabupaten Magelang

Lailathul Indra Sari

PT. Sinergi Visi Utama

(Jl. Retno Dumilah No. 56B, Prenggan, Kec.Kotagede, Yogyakarta, Indonesia)

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang

(Jl. Raya Tlogomas, no.264, Malang, Indonesia)

*Corresponding Author: lailathulindrasari@webmail.umm.ac.id

Abstrak

Rendahnya tingkat literasi di Indonesia yang disebabkan kurangnya masyarakat dalam memahami dan mengolah informasi, sehingga membuat Perpustakaan Nasional membuat sebuah program prioritas yang dapat mengupayakan meningkatnya indeks literasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses kolaborasi dalam pelaksanaan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Magelang. Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) tercantun dalam Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 tahun 2023. Program bertujuan untuk menjadikan perpustakaan sebagai tempat belajar sepanjang hayat dan membuat perpustakaan berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga dengan Kegiatan produktifitas di perpustakaan yang diikuti oleh masyarakat nantinya dapat meningkatkan indeks literasi melalui kunjungan masyarakat terhadap perpustakaan, selain itu juga memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan mendapatkan ilmu melalui Kegiatan pelatihan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata kelola kolaborasi yang dijalankan dalam pembangunan literasi melalui Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan Teknik analisis data yang berpacu pada objek penelitian teori collaborative governance Ansell and Gash. Adapun hasil penelitian ini yaitu proses kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dengan pemangku kepentingan dipengaruhi dengan adanya komitmen yang selalu dijaga dan diperkuat oleh masing-masing Lembaga dengan memberikan partisipasi dalam bentuk anggaran, sarana dan prasarana dan narasumber untuk mengisi pelatihan. Proses pelaksanaan program yang didukung oleh pemangku kepentingan dan didasarkan pada peraturan yang berlaku sehingga pelaksanaan dapat dilakukan meskipun sedikit terkendala dalam anggaran namun pihak perpustakaan selalu mengupayakan dan menghasilkan implementasi program setiap tahunnya. Keterbukaan dilakukan dengan melakukan publikasi setiap Kegiatan yang telah dilakukan pada media sosial ataupun media cetak.

Kata Kunci: Literasi, tata kelola, komitmen, kolaborasi

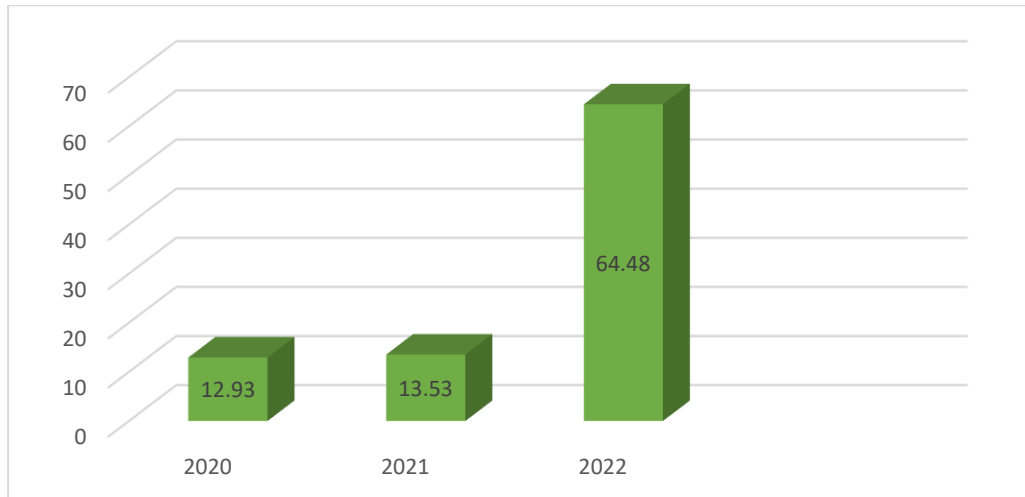
Pendahuluan

Literasi diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan keterampilannya untuk membaca, menulis, memahami dan mengolah informasi yang telah didapatkan, sehingga nantinya akan memberikan manfaat bagi diri sendiri dan sekitar. Kemampuan literasi yang baik dalam seseorang akan memberikan dampak pemahaman informasi yang didapatkan melalui informasi lisan ataupun tertulis (Oktariani & Ekadiansyah, 2020). Rendahnya tingkat literasi di Indonesia berdasarkan

Silakan kutip artikel ini sebagai: Sari, Lailathul Indra. (2024) Tata Kelola Kolaborasi Pembangunan Literasi Masyarakat Melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) di Kabupaten Magelang. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 1(1), 93-110. <https://doi.org/10.70214/zpe3bj18>

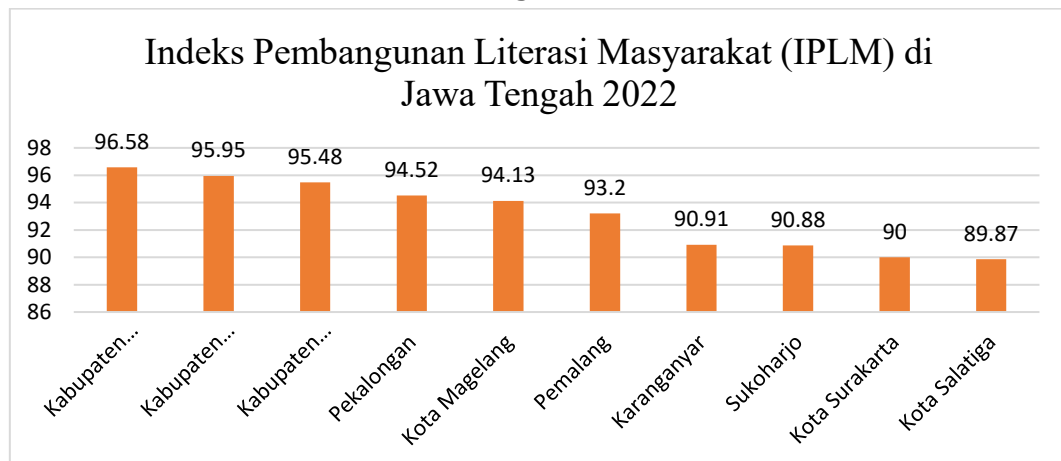
dengan data Perpustakaan Nasional Indonesia memiliki 178.723 perpustakaan yang tersebar di seluruh daerah Indonesia, namun dengan banyaknya jumlah perpustakaan tersebut tidak menjamin tingkat literasi tinggi, bahkan sebaliknya bahwa literasi masyarakat Indonesia dan minat baca cukup rendah ([Widyawati & Winoto, 2022](#)).

Diagram 1. Peningkatan IPLM Nasional



Sumber: Dokumen Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2022

Berdasarkan dengan Diagram diatas dijelaskan bahwa kenaikan indeks Literasi selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Berdasarkan dengan data dari Perpustakaan nasional di tahun 2020 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Indonesia masih dikatakan tergolong rendah yang berkisar hanya 12,93 persen dan untuk di tahun 2021 nilai mengalami kenaikan sebesar 13,53. Sedangkan pada tahun 2022 peningkatan cukup banyak dalam Indeks Pembangunan Literasi (IPLM) sebesar 64,48 persen ([PT Sigma Research Indonesia, 2021](#)). Peningkatan tersebut juga dipengaruhi melalui pencapaian dari setiap daerah yang telah berhasil meningkatkan pembangunan literasinya salah satunya adalah Provinsi Jawa Tengah khususnya pada Kabupaten Magelang yang telah berhasil meningkatkan pembangunan literasi di Kabupaten Magelang dan meraih peringkat pertama pada tingkat Provinsi Jawa Tengah. Hal itu dapat dibuktikan melalui data diagram berikut:

Diagram 1. Indeks Literasi Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Dokumen IPLM Tahun 2022

Kabupaten Magelang yang memiliki nilai Indeks Literasi Masyarakat (IPLM) tertinggi diraih oleh Kabupaten Magelang sebesar 96,58. Kemudian untuk capaian tertinggi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Jawa Tengah diraih oleh Kabupaten Kebumen sebesar 95,95% dan kemudian Kabupaten Boyolali 95,48%. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) menjadi bentuk usaha dari pemerintah yang bertujuan untuk mengukur kinerja yang telah mereka lakukan, sehingga mereka mengetahui seberapa banyak ketercapaian yang didapat dalam pekerjaannya. Dalam upaya meningkatkan indeks literasi, pemerintah melaksanakan sebuah program yang bertujuan untuk mengetahui indeks Pembangunan literasi Masyarakat (IPLM). Upaya tersebut dilakukan dengan menerapkan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), memperkuat fungsi dan peran perpustakaan sebagai media belajar sepanjang hayat. Dalam program ini perpustakaan bukan digunakan sebagai tempat untuk mencari informasi dan membaca buku saja, tetapi perpustakaan digunakan sebagai wadah dalam mengembangkan bakat Masyarakat yang tidak berkembang karena tidak tersedianya wadah untuk melakukan perkembangan *skill* yang mereka miliki. Sehingga pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten atau kota dan Pemerintah Desa menjalankan program tersebut sesuai dengan kebijakan yang telah dinaungkan untuk mewadahi kemampuan yang dimiliki Masyarakat. (Purwantini et al., 2021).

Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) tercantum dalam Peraturan Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional RI memiliki kebijakan tentang perpustakaan yang harus mengalami perubahan yaitu Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan salah satu program prioritas dari Perpustakaan Nasional dan mendapat dukungan dari Bappenas. Kabupaten Magelang merupakan salah satu daerah yang diamanatkan untuk mengimplementasikan program prioritas dari Perpustakaan Nasional dan telah berhasil mendapatkan penghargaan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas dan Kearsipan Kabupaten Magelang, dikarenakan berkat komitmen yang dipertahankan dalam proses berjalannya program dapat terlaksana

dengan baik dan berhasil meraih penghargaan dan masuk dalam 4 kategori yang pertama sebagai perpustakaan Kabupaten/Kota yang berhasil mengimplementasikan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) pada tahun 2021, capaian tersebut meraih penghargaan secara terus-menerus selama 3 tahun.

Capaian dengan penilaian pelaksanaan program TPBIS terbaik secara nasional tentu terdapat praktek tata kelola kolaborasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang dalam menjalankan program dari pemerintah pusat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses kolaborasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang dengan para *stakeholders* untuk berkomitmen dalam pelaksanaan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) ini sehingga sampai mendapatkan predikat baik dan dinyatakan pengimplementasian program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) terbaik pada Tingkat nasional di tahun 2021 (Gutama & Widiyahseno, 2020).

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif untuk mengetahui tata kelola kolaborasi pembangunan literasi masyarakat melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) di Kabupaten Magelang. Menurut Buku design Penelitian (Moleong, 2005) penelitian kualitatif dimaknai untuk mengkaji dan mengklarifikasi mengenai adanya fenomena yang terjadi di masyarakat dijelaskan dengan terperinci. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Magelang sebagai sumber, Sekertaris Dinas Perpustakaan Bidang Perpustakaan yang menjadi narasumber untuk wawancara baik secara langsung ataupun melalui whatsapp. Kemudian untuk data sekunder dilakukan dengan mengelompokkan dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penelitian seperti notulensi rapat, arsip dinas, jurnal ilmiah, buku literature, dokumen peraturan yang membahas tentang pelaksanaan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dan Buku Pedoman Penyelenggaraan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dari Perpustakaan nasional. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan memilih dan memilah sumber informasi yang didapatkan baik itu melalui dokumen, wawancara dan observasi.

Hasil dan Pembahasan

Terlaksananya Komitmen antar Stakeholders dalam Pembangunan Literasi Melalui Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) di Kabupaten Magelang

a. Komitmen *Stakeholders* Terhadap Pembangunan Literasi Melalui Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)

Pembangunan literasi masyarakat dalam setiap daerah dibutuhkan dalam kondisi seperti sekarang ini pasalnya telah dibutuhkan bahwa minim akan literasi sehingga perlu adanya peningkatan pembangunan literasi masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah mengupayakan hal tersebut melalui Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dengan penunjukan tanggung jawab program pada setiap daerah

dengan cara memberikan tanggung jawab kepada setiap daerah untuk mengimplementasikan pembangunan literasi melalui Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dengan menunjuk setiap Kepala Dinas Perpustakaan di setiap daerah untuk bertanggung jawab akan segala pelaksanaan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Kemudian setelah diberikan tanggung jawab oleh pemerintah pusat, Kepala Dinas Perpustakaan yang dibawahhi oleh Kepala Bidang Perpustakaan yang juga diberikan tanggung jawab dalam pelaksanaan program dilapangan dan memberikan perintah kepada sekretaris bidang perpustakaan untuk bertanggung jawab penuh terhadap Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) kemudian melakukan sosialisasi dan mengkomunikasikan program pada pemerintah desa. Adapun aktor yang terlibat dalam proses tata kelola kolaborasi pembangunan literasi, sebagai berikut.

Tabel 1. Aktor Pemerintah

Instansi / Lembaga	Tupoksi Aktor
Perpustakaan Nasional	Mendukung pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan seluruh jenis perpustakaan.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Mensosialisasikan program dan kegiatan yang berhubungan dengan perpustakaan.
Pemerintah Daerah	Penerima Mandat untuk mensosialisasikan Program pada Dinas terkait
Pemerintah Desa	Penerima manfaat pelaksanaan program
Dinas Pendidikan	Mengelola penyelenggaraan Pendidikan

Sumber: Diolah tahun 2024

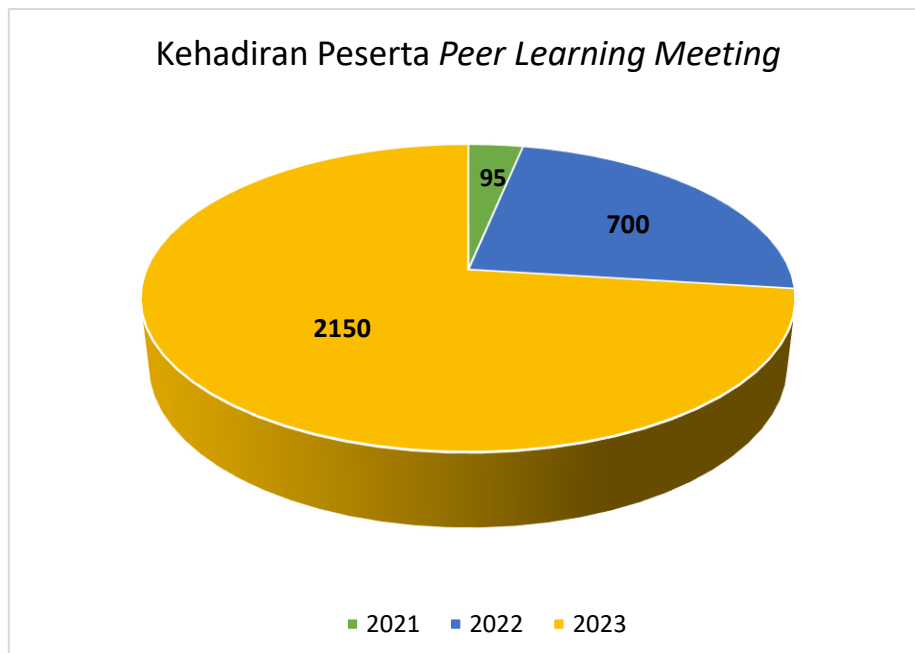
Aktor tersebut berpartisipasi terhadap terlaksananya pembangunan literasi melalui Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dengan tupoksinya masing-masing seperti halnya pemerintahan yang memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat sehingga dari para aktor diatas sepeti Perpustakaan Nasional, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Dinas Pendidikan yang masing-masing memiliki tupoksi turut mendukung pengembangan program. Selain aktor yang berasal dari pemerintahan terdapat aktor dari non-pemerintahan yang juga turut serta dalam kegiatan kolaborassi dalam pembangunan literasi masyarakat melalui Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) seperti.

Tabel 2. Aktor Non-Pemerintahan

Instansi / Lembaga	Tupoksi Aktor
Perguruan Tinggi BUMN	Menjadi pemateri dalam kegiatan pelatihan Memberikan dorongan pelaksanaan program berupa anggaran
BUMD	Memberikan anggaran melalui dana CSR untuk pelaksanaan program
Komunitas Perusahaan Swasta (PD. BPR Bank Bapas 69 Magelang, Perumda Tirta Gemilang, dll)	Mengisi kegiatan pelatihan di perpustakaan Memberikan dorongan pelaksanaan kegiatan berupa anggaran dan sarana prasarana
Bunda Literasi Masyarakat	Menghadiri setiap kegiatan perpustakaan Berpartisipasi dalam setiap kegiatan pelatihan melalui Program TPBIS

Sumber: Diolah tahun 2024

Tabel diatas dapat menjelaskan aktor terkait dalam non-pemerintah yang terdiri dari Perguruan tinggi yang membantu untuk menghadirkan pemateri dalam kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh perpustakaan, kemudian BUMN yang bertugas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di perpustakaan dengan memberikan bantuan anggaran dan BUMD adalah perusahaan milik daerah yang memiliki tupoksi untuk menyuntikkan dana anggaran melalui CSR pada setiap kegiatan desa salah satunya adalah kegiatan pelatihan yang diselenggarakan di perpustakaan. Selanjutnya terdapat aktor non-pemerintah yaitu komunitas yang memberikan dukungannya dengan hadir sebagai pelatih dalam kegiatan pelatihan yang diselenggarakan perpustakaan, perusahaan swasta yang juga mendukung dalam pemberian bantuan berupa anggaran dan sarana prasarana untuk perpustakaan, selanjutnya bunda literasi yang senantiasa turut hadir dalam setiap kegiatan perpustakaan yang diselenggarakan dan yang terakhir adalah masyarakat yang berperan sebagai pemberi partisipasi terbaik pasalnya tanpa adanya kehadiran peserta dari masyarakat untuk menghadiri setiap kegiatan di perpustakaan segala program dan kegiatan tidak dapat berjalan dengan berhasil. Bentuk komitmen lainnya juga berasal dari partisipasi pemangku pementingan untuk memberikan dukungann dengan melalui beberapa bantuan seperti yang dijelaskan dalam data dibawah ini berupa partisipasi pemangku kepentingan melalui kegiatan *peer learning meeting* ([Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2023](#)).

Diagram 2. Kehadiran Peserta *Peer Learning Meeting*

Sumber: Diolah tahun 2024

Grafik diatas menunjukkan bahwa partisipasi pada kehadiran Kegiatan *peer learning meeting* terdapat pertambahan peserta yang datang untuk menghadiri rapat setiap tahunnya. Kegiatan *peer learning meeting* tersebut diikuti oleh beberapa pemangku kepentingan yang juga turut serta dalam pengimplementasian Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) (Mahdi Reza & Andi Asari, 2020). Kegiatan *Peer Learning Meeting* ini telah tertera pada Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan dijelaskan pada Pasal 16 yang menjelaskan mengenai kegiatan tersebut bahwa berdasarkan pada peraturan perpustakaan kegiatan *Peer Learning Meeting* wajib dilaksanakan setiap tahunnya dan kegiatan tersebut juga telah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang sesuai dengan arahan yang terdapat pada Peraturan Perpustakaan dan telah dilakukan pada setiap tahunnya. Kolaborasi pembangunan literasi juga didukung dengan adanya bantuan anggaran dari APBD Kabupaten Magelang untuk mendukung pelaksanaan program sebagai berikut.

Diagram 3. Partisipasi Anggaran dari APBD Kabupaten Magelang

Sumber: Diolah tahun 2024

Berdasarkan dengan data diagram diatas dapat ditunjukkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang pada tahun 2021 menganggarkan Rp. 407.995.000 untuk kepentingan pelaksanaan program dan Kegiatan di perpustakaan. Kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan penganggaran pada keperluan pelaksanaan program dan Kegiatan di perpustakaan sebesar Rp. 538.109.340. Disamping anggaran dari pemerintah daerah Kabupaten Magelang, anggaran juga didapatkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk perpustakaan, anggaran yang di dapatkan pada tahun 2021 sebesar Rp. 300.000.000 kemudian tambahan anggaran juga diperoleh ditahun 2022 yang meningkat menjadi Rp. 500.000.000. Anggaran tambahan juga didapatkan dari pemerintah provinsi yang dengan memberikan tambahan anggaran sebesar Rp. 5.580.000.000. Tujuan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah tersebut nantinya dialokasikan untuk dipergunakan dalam pelaksanaan program dan Kegiatan di perpustakaan. Disamping anggaran dari pemerintah terdapat anggaran dari pihak swasta yang tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Partisipasi Anggaran dari Pihak Swasta

Lembaga	Jumlah Anggaran	Keterangan
PD. BPR Bank Bapas 69 Magelang	Rp. 22.000.000	1.Pelatihan Olahsan Resin 2.Kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM)
Bank Jateng Cabkor Magelang	Bank Jateng Cabkor Magelang Rp. 14.000.000	1.Replikasi Perpustakaan Desa 2.Kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM)
Total Anggaran	Rp. 36.000.000	

Sumber: Diolah tahun 2024

Data tabel diatas merupakan data anggaran yang diberikan oleh pihak swasta melalui program CSR untuk memberikan dukungan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam mereplikasikan perpustakaan berbasis inklusi sosial kepada desa di Kabupaten Magelang. Anggaran tersebut terkumpul sebesar 36 juta rupiah dengan pemberian dana tersebut melalui PT. Bank Bapas 69 Magelang sebesar 22 juta dan Bank Jateng Cabkor Magelang sebesar 14 juta rupiah. Bantuan tidak hanya diberikan dalam bentuk anggaran saja oleh pihak swasta, melainkan diberikan dalam bentuk sarana dan prasarana yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Partisipasi Berupa Bantuan Sarana dan Prasarana

Lembaga	Jenis Bantuan	Keterangan
PD. BPR Bank Bapas 69 Magelang	-2 Unit PC-200 Koleksi Buku	Replikasi Perpustakaan Desa
Bank Jateng Cabkor Magelang	3 Unit PC	Pelayanan Informasi Masyarakat
PT. Jasaraharja Magelang	1 Unit PC dan Printer	Pelayanan Masyarakat dan Administrasi
PT. BPR BKK Muntilan (Perseroda)	1 Unit PC	Pelayanan Infomasi Masyarakat
Perumda Tirta Gemilang	1 Unit PC	Pelayanan Masyarakat
BTM Bima	1 Unit Printer	Kepentingan Administrasi

Sumber: Diolah tahun 2024

Data tabel diatas menjelaskan terkait dengan bantuan yang diperuntukkan pada Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) berupa non-

anggaran. Bantuan tersebut berbentuk fasilitas berupa barang yang diberikan untuk perpustakaan guna menunjang kegiatan di perpustakaan. Berdasarkan dengan data diatas terdapat bantuan berupa Printer, 8 unit PC dan 200 koleksi buku yang diberikan oleh pemangku kepentingan yang telah menjalin Kerjasama dengan pihak perpustakaan dan bantuan tersebut sepenuhnya diberikan untuk replikasi perpustakaan agar merata diberikan kepada seluruh desa di Kabupaten Magelang. Bantuan PC tersebut digunakan untuk pelayanan informasi masyarakat jika mereka ingin mencari informasi secara online pada saat mengunjungi perpustakaan dan melakukan kegiatan administrasi di perpustakaan disaat mereka mengunjungi baik itu untuk print tugas apabila ada masyarakat dari sekolah untuk mencetak tugasnya secara gratis.

a) **Komitmen Pelaksanaan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)**

Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang diamanatkan untuk mereplikasikan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) ke daerah yang ada di provinsi Jawa Tengah. Pihak pemerintah provinsi melakukan koordinasi dengan Dinas terkait yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di setiap daerah. Penelitian ini memfokuskan pada daerah Kabupaten Magelang. Dinas Perpustakaan Kabupaten Magelang merupakan salah satu daerah yang berada di Jawa Tengah dengan capaian implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Bersedianya pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang untuk mengimplementasikan dan mereplikasikan program kepada perpustakaan desa di wilayah Kabupaten Magelang melewati beberapa proses yang harus dilakukan dalam setiap prosesnya dengan mengacu pada buku panduan yang diberikan oleh perpustakaan nasional untuk mengimplementasikan perpustakaan (Maswakang, Ahmad Yamin, 2023). Proses yang dilakukan untuk pelaksanaan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dengan melaksanakan beberapa kegiatan rapat yang juga telah diamanatkan dalam Peraturan Perpustakaan nasional Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Berikut alur pada proses pelaksanaan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).

Pelaksanaan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang dengan menawarkan sejumlah strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilakukan melalui literasi serta pelaksanaannya dilakukan di Perpustakaan. strategi yang telah ditawarkan dengan mempertimbangkan kebutuhan dari program yang akan dilaksanakan sehingga terjadilah tawar menawar oleh setiap pemangku kepentingan yang pada akhirnya disepakati bahwa strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan program ini adalah peningkatan informasi yang mana perpustakaan dijadikan tempat mendapatkan sumber informasi. Kemudian pelibatan masyarakat yang juga diperlukan untuk keberhasilan kegiatan yang diselenggarakan oleh perpustakaan dan advokasi yang merupakan strategi dengan membangun dukungan kebijakan dan sumberdaya yang diperoleh melalui pemangku kepentingan yang terlibat. Penawaran strategi tersebut juga disampaikan dalam rapat Bersama dengan pemangku kepentingan

melalui *stakeholders meeting* berikut beberapa kegiatan rapat Bersama dengan pemangku kepentingan.

Tabel 3. Hasil Kegiatan Stakeholders Meeting

Luaran Kegiatan	Dampak Kegiatan	Hasil Keberlanjutan
Pelatihan TIK	Memiliki Kemampuan dalam bidang TIK	Perpustakaan Mandiri
Pelatihan Memasak	Skill memasak bertambah	Memiliki Usaha Kue Basah
Pelatihan menjahit	Bertambahnya kemampuan menjahit	Membuat produk sprei dan sarung bantal rumahan
Buku 1500 eksemplar	Koleksi buku bertambah	Jenis buku bervariasi
Pelatihan Kerajinan Tali kur	Memiliki kemampuan membuat kerajinan berupa bros dan gantungan kunci	Mengajarkan ilmu dan kemampuannya kepada ana-anak sekitar
Pelatihan Craft Bucket	Memiliki kemampuan membuat Bucket	Membuat kelompok usaha kerajinan

Sumber: Diolah tahun 2024

Kegiatan rapat pada tabel diatas menjelaskan bahwa setiap rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan menghasilkan luaran berupa beberapa usulan kegiatan yang mana pada kegiatan tersebut juga telah dilaksanakan dan memberikan dampak kepada peserta yang mengikuti pelatihan tersebut. Setiap kegiatan yang dilakukan pada perpustakaan juga memiliki hasil keberlanjutan dimana dalam hal tersebut para peserta mengembangkan ilmu dan keahlian yang didapatkan melalui pelatihan. Kegiatan tersebut didukung penuh oleh pihak swasta untuk mereplikasikan Program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) secara mandiri. Prioritas dari pelayanan perpustakaan ini adalah mengembangkan perpustakaan desa yang sudah ber-SNP dapat berfungsi dengan baik dan masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas melalui perpustakaan, sehingga tidak hanya membaca bacaan saja tetapi mereka dapat melakukan kegiatan di perpustakaan guna mengembangkan kemampuan dan kualitas diri mereka.

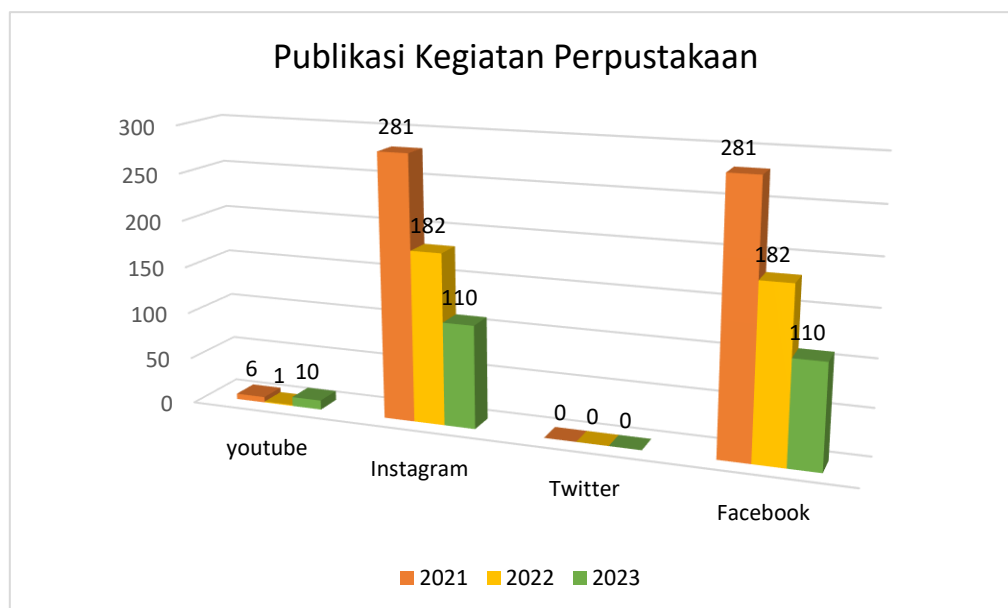
Jadi pada pelaksanaan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) di Kabupaten Magelang telah dilaksanakan sesuai dengan buku pedoman. Proses pelaksanaannya sudah dilaksanakan keseluruhan dan telah mengikuti aturan dari Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Proses pelaksanaan Program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dilakukan dengan mengikuti rapat terlebih dahulu berupa *peer learning meeting* dan *stakeholders meeting*. Kegiatan itu dapat dilakukan secara nasional melalui zoom ataupun dilaksanakan di beberapa tempat yang telah diatur oleh penyelenggara. Namun dalam setiap Kegiatan pelatihan belum sepenuhnya peserta yang mengikuti berhasil mengembangkan ilmu yang didapatkan. Sehingga terdapat tugas untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang untuk membina dan mendorong

peserta lainnya agar dapat mengembangkan ilmunya sampai mereka dapat memiliki timbal baik melalui Kegiatan pelatihan untuk kehidupannya.

b) Komitmen Publikasi Pembangunan Literasi Melalui Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)

Transparansi pada setiap Kegiatan yang dilakukan dan diselenggarakan pada setiap daerah oleh pemerintahan sangat diperlukan untuk keperluan laporan kinerja dari aparat pemerintah bagaimana kinerja yang dilakukan oleh mereka dalam menjalankan tugasnya. Pelaksanaan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) di Kabupaten Magelang adalah Program yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional yang diberikan kepada daerah seluruh Indonesia dengan dibawah naungan Dinas Perpustakaan di setiap daerah. Sehingga, transparansi berupa publikasi dalam setiap Kegiatan yang dilakukan dalam program tersebut sangat dibutuhkan. Publikasi sendiri adalah bagian unsur dari Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dengan memiliki target capaian untuk memberikan transparansi atau keterbukaan laporan kegiatan pada masyarakat ataupun pemangku kepentingan untuk dilakukan monitoring dan evaluasi. Adapun wadah publikasi kegiatan dari Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagai berikut.

Grafik 5. Publikasi Kegiatan TPBIS



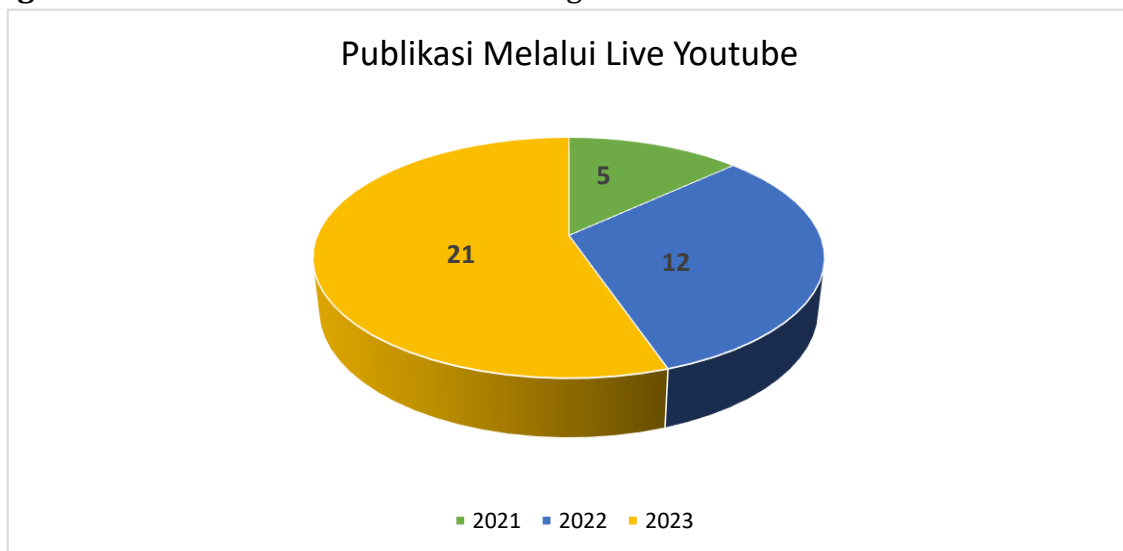
Sumber: Diolah Tahun 2024

Grafik diatas menjelaskan bahwa adanya jumlah publikasi dalam setiap tahunnya yang dipublikasikan pada sosial media Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Magelang. Melalui media sosial tersebut Dinas Perpustakaan melakukan publikasi pada setiap tahunnya lebih aktif dan sering melakukan publikasi melalui Instagram dan Facebook. Melalui data diatas dapat dilihat bahwa Instagram dan Facebook memiliki jumlah publikasi yang sama dikarenakan jika melakukan publikasi di Instagram maka

kegiatan yang sama juga dilakukan publikasi di Facebook. Sedangkan untuk postingan melalui Twitter Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang tidak begitu aktif dalam menggunakan media tersebut, pasalnya pada saat dilihat pada akun Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang tidak terdapat postingan yang berisikan kegiatan perpustakaan. Sedangkan untuk publikasi melalui Youtube juga kurang konsisten dalam mengupload konten, hal tersebut telah terlihat dalam data grafik di atas bahwa tertinggi selama 3 tahun terakhir banyak melakukan publikasi pada tahun 2023. Sedangkan pada tahun sebelumnya tidak terlalu aktif menggunakan Youtube.

Publikasi juga dilakukan melalui Live Streaming Youtube yang dilakukan melalui channel Youtube Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang. Dalam Live Streaming tersebut berisikan mengenai Kegiatan rapat yang sedang berlangsung di Dinas Perpustakaan Bersama dengan pemangku kepentingan. Bukan hanya Kegiatan rapat, melainkan Kegiatan perpustakaan juga dilakukan Live Streaming melalui Channel Youtube Dinas Perpustakaan. Adapun jumlah kegiatan yang dilakukan publikasi melalui live Youtube Dina Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang sebagai berikut:

Diagram 6. Publikasi Melalui Live Streaming Youtube



Sumber: Diolah Tahun 2024

Melalui diagram diatas dapat diketahui bahwa publikasi yang aktif dilakukan melalui *live youtube* lebih sering aktif dilaksanakan pada tahun 2023 dengan melaksanakan *live* kegiatan sebanyak 21 kali diupload melalui Youtube Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang. Kemudian pada tahun 2022 masih dapat dikatakan cukup banyak kegiatan yang dilakukan sehingga publikasi dan pelaksanaan live melalui akun Youtube terlaksana sebanyak 12 kali dan kegiatan tersebut tidak terlalu banyak kegiatan yang dipublikasikan secara live terletak pada tahun 2021 yang hanya 5 kali melaksanakan live melalui akun Youtube. Sehingga berdasarkan dengan data diatas publikasi yang dilakukan melalui Live Youtube mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa kegiatan publikasi telah dilakukan dengan tiga metode publikasi

yaitu secara online, Offline atau cetak dan Elektronik. Dimana publikasi secara elektronik ini ditayangkan atau diliput pada stasiun TV maupun radio.

Sedangkan untuk publikasi secara elektronik yang dijelaskan oleh Bapak Wahyu Selaku Sekertaris di Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang juga menjelaskan bahwa bekerjasama dan membangun komitmen untuk melakukan publikasi kegiatan perpustakaan dengan beberapa mitra seperti TVRI Jogja yang menampilkan melalui iklan dan tayangan kegiatan perpustakaan pada stasiun tv tersebut, kemudian melakukan Talkshow dengan Radio Gemilang FM membahas terkait dengan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan kegiatan yang dilaksanakan di perpustakaan. Serta, Live Talkshow yang juga dilaksanakan melalui Radio Fas FM. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang dalam melaksanakan Kegiatan selalu dilaporkan melalui website khusus dari Perpustakaan Nasional yang didalamnya memuat Kegiatan yang dilakukan melalui Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Website resmi hanya dapat diakses oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Pemahaman Bersama Antar Stakeholders dalam Pelaksanaan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)

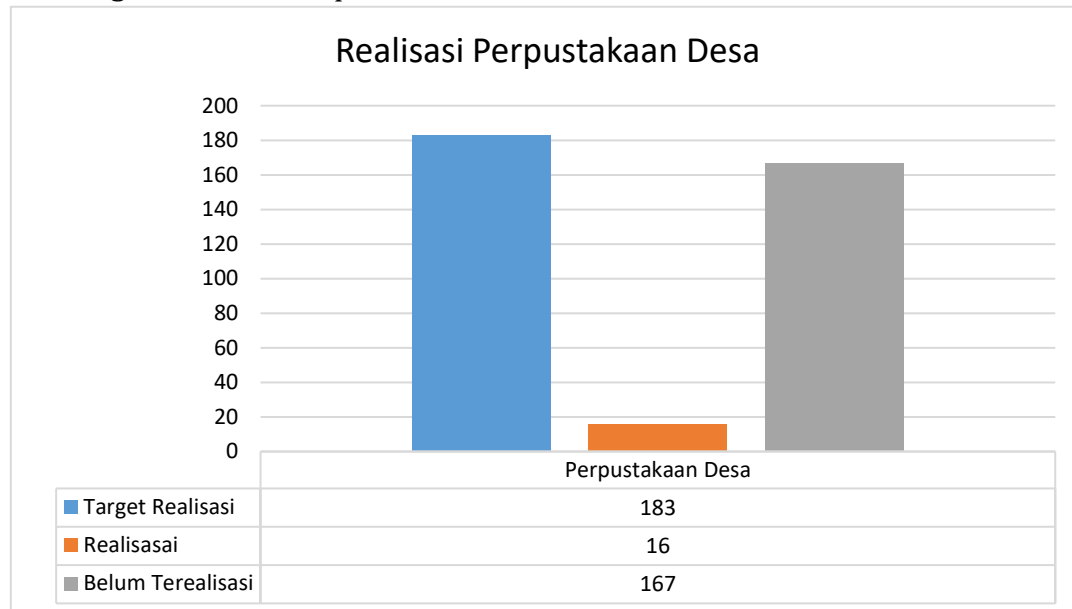
a. Pemahaman Bersama Antar Stakeholders Terhadap Pembangunan Literasi Melalui Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)

Membangun sebuah kepercayaan terhadap mitra untuk melakukan Kerjasama memang dibutuhkan dalam melakukan kolaborasi demi mencapai tujuan. Kepercayaan yang dibangun oleh kedua belah pihak lebih membutuhkan waktu yang Panjang sekaligus komitmen yang kuat. Jika salah satu dari pihak tidak bertanggung jawab dengan komitmen dan melanggar komitmen yang telah dibangun sejak awal maka kepercayaan itu tidak akan terbangun. Terutama dalam melaksanakan sebuah program yang mana banyak melibatkan stakeholders , sehingga komitmen menjadi elemen yang penting. Penyelenggaraan perpustakaan dalam daerah tidak hanya langsung diselenggarakan begitu saja (Swandari & Jemani, 2023). Namun penyelenggaraan perpustakaan didasarkan pada beberapa asas seperti asas pembelajaran sepanjang hayat yang artinya perpustakaan menjadi tempat untuk belajar kapan pun, kemudian asas demokrasi, keadilan yang mana penyelenggaraan perpustakaan dalam setiap daerah harus dilakukan secara adil, profesionalitas yang dimana para penyelenggara perpustakaan harus bekerja secara profesional tidak memihak pada pihak manapun, kemudian keterukuran dan kemitraan dimana dalam proses penyelenggaraan perlu untuk dilakukan kegiatan bermitra. Kegiatan bermitra sendiri berfungsi untuk mendukung pemerintah dari pihak lain baik itu pihak swasta, perguruan tinggi dan masyarakat untuk berpartisipasi. Asas tersebut juga disebutkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Magelang pasal 2.

Pada konteks Kolaborasi yang dilakukan oleh banyak pihak untuk menjalankan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), sehingga perlu untuk ditekankan sejak melakukan rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan terhadap program untuk menguatkan komitmen dan misi atau tujuan secara seksama agar tercapai tujuan yang diharapkan oleh seluruh pihak terkait. Kolaborasi tersebut

memiliki target untuk dapat mereplikasikan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial kepada seluruh desa di Kabupaten Magelang, namun dari segi anggaran belum mampu untuk direplikasikan. Setiap program tentunya memiliki target, seperti halnya mereplikasikan perpustakaan desa tentunya memiliki target dan berapa yang sudah tereplikasikan, hal tersebut disajikan dalam grafik berikut.

Grafik 7. Target Realisasi Perpustakaan Desa



Sumber: Diolah tahun 2024

Grafik diatas menjelaskan terkait dengan target realisasi perpustakaan desa dalam Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Implementasi tersebut telah dilakukan sosialisasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang. Pada grafik tersebut menjelaskan bahwa realisasi perpustakaan desa telah dilakukan sebanyak 16 perpustakaan desa dan lolos dalam tahap seleksi untuk bersedia dilakukan implementasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Sedangkan pada target realisasi adalah 183 perpustakaan yang artinya seluruh perpustakaan desa diharapkan dapat menerima manfaat sama dengan perpustakaan yang sudah terealisasi. Sehingga dari data tersebut juga menjelaskan masih terdapat 167 perpustakaan desa yang belum terealisasi terkait dengan perpustakaan. Oleh sebab itu berbagai Upaya dari pemerintah untuk terus berusaha merealisasikan perpustakaan dalam setiap tahunnya. Sehingga melalui data grafik diatas menunjukkan realisasi perlu untuk dilakukan peningkatan dengan mengupayakan setiap tahunnya melakukan replikasi di perpustakaan desa dan hal tersebut juga sudah dilakukan oleh pihak Dinas Perpustakaan.

Amroni selaku Kepala Bidang Perpustakaan mengatakan dalam wawancara bahwa komitmen pihak dinas serta pemangku kepentingan lainnya selalu mengupayakan untuk memberikan fasilitas yang dibutuhkan perpustakaan dalam menunjang pelaksanaan program TPBIS salah satu komitmen pemangku kepentingan yang terlibat memberikan Support berupa PC 2 unit yang diberikan kepada perpustakaan, kemudian 1 Unit printer dan juga bahan Pustaka sebanyak 150 eksampler yang dilihat melalui hasil observasi

dengan melihat sosial media Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengenai bantuan sarana dan prasarana tersebut kepada perpustakaan desa.

b. Pemahaman Bersama Antar *Stakeholders* Terkait Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)

Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) di Kabupaten Magelang dilakukan dengan melaksanakan program melalui penyelenggaraan yang berada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang yang menghadirkan peserta dari kalangan masyarakat Kabupaten Magelang. Sehingga melalui proses identifikasi ini dilakukan beberapa kegiatan yang kemudian setelah selesai melaksanakan kegiatan dilakukan pemantauan atau identifikasi pada kegiatan tersebut apakah ada yang harus diperbaiki atau dirubah dalam proses kegiatan. Bukan hanya itu, identifikasi ini juga dapat dilakukan dengan monitoring dan evaluasi. Hal tersebut juga berhubungan dengan kuatnya komitmen dari Dinas Perpustakaan dan pemangku kepentingan lainnya yang melakukan Kerjasama untuk mewujudkan tujuan bersama (Kurniasih & Saefullah, 2021). Kegiatan identifikasi dengan melakukan monitoring dan evaluasi juga tertera pada Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan tertera pada pasal 9 bahwa perpustakaan daerah harus melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan yang salah satunya meliputi monitoring dan evaluasi.

Banyaknya perubahan yang terjadi pada saat pelaksanaan program tersebut. Contoh perubahan yang terlihat sendiri dapat dirasakan melalui peran dan fungsi dari perpustakaan sangat meningkat. hal tersebut dikarenakan banyaknya masyarakat yang mendatangi perpustakaan tidak hanya untuk membaca di perpustakaan, melainkan masyarakat dapat mendatangi perpustakaan untuk mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang yang juga menghadirkan pemateri sesuai dengan bidang pelatihannya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang melakukan replikasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) ini sangat menjaga konsistensinya demi memberikan perubahan dalam diri masyarakat melalui literasi, hal tersebut dimulai dengan memberikan pelatihan dalam bentuk apapun yang mana pelatihan tersebut akan memberikan bekal *skill* untuk para masyarakat yang ingin mengembangkan kemampuan mereka, Kegiatan tersebut dilakukan pada perpustakaan yang juga menghadirkan komunitas terkait. Konsistensi yang dilakukan oleh pihak Dinas Perpustakaan kepada masyarakat dapat terlihat dari diadakannya berbagai macam pelatihan yang besar dari berbagai bidang pelatihan dan diikuti oleh masyarakat yang mayoritas adalah Ibu Rumah Tangga. Konsistensi pemerintah dan pihak terkait dalam menyukseskan program dengan mengadakan Kegiatan di perpustakaan hal tersebut dapat dilihat dari data berikut.

Grafik 8. Identifikasi Kegiatan Pelatihan Pada Program TPBIS

Sumber: Diolah tahun 2024

Data grafik diatas dapat dilakukan identifikasi terhadap Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) melalui Kegiatan pelatihan. Beberapa Kegiatan tersebut telah menjadikan perpustakaan bekerja sesuai dengan peran dan fungsinya yaitu menjadi tempat belajar sepanjang hayat . Grafik diatas menjelaskan bahwa belajar tidak hanya membaca koleksi buku dalam perpustakaan, melainkan dalam melakukan proses belajar masyarakat dapat mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang seperti diatas. Kegiatan juga tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum saja namun kegiatan seperti pelatihan craft dan olahan resin juga diikuti oleh penyandang disabilitas. Kemudian dari pelatihan tersebut peserta melakukan pengembangan dari ilmu dan *skill* yang telah mereka dapatkan melalui pelatihan di perpustakaan desa masing-masing yang kemudian tergabung dalam grup khusus di whatsapp yang berisikan terkait dengan pelatihan yang telah dilaksanakan guna untuk melakukan monitoring setelah melaksanakan pelatihan. Sehingga berdasarkan data tersebut dapat diketahui Kegiatan pelatihan mengalami pertambahan setiap tahunnya yang mana dapat dilihat pada tahun 2021 terdapat 5 kegiatan berupa pelatihan sebagai bentuk implementasi Transformasi perpustakaan Berbasis inklusi Sosial (TPBIS), selanjutnya dalam tahun 2022 mengalami pertambahan kegiatan menjadi 8 kegiatan pelatihan yang dilakukan dan pada tahun 2023 melaksanakan 9 kali kegiatan pelatihan.

Berdasarkan hasil observasi yang juga menyesuaikan dengan data dan informasi yang dijelaskan sebelumnya bahwa identifikasi melalui penyelenggarannya Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) di Kabupaten Magelang telah dilaksanakan dengan konsisten dengan melakukan kegiatan pelatihan yang dapat dibuktikan melalui pertambahan kegiatan pelatihan setiap tahunnya. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dalam program ini dilakukan kurang lebih 1 sampai 3 kali pada masa

pelatihan. Selain itu kegiatan pelatihan tersebut juga dilakukan monitoring dan evaluasi melalui grup whatsapp pelatihan yang telah dilaksanakan untuk update perkembangan dari setiap peserta yang mengikuti rapat. Jadi pada pelaksanaannya Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) identifikasi dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan yang dilaksanakan dalam setiap tahunnya apakah bertambah atau justru berhenti. Dalam kegiatan pelatihan melalui Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) ini berjalan dengan konsisten pasalnya hal tersebut dapat dibuktikan melalui bertambahnya kegiatan yang bertambah dalam setiap tahunnya.

Kesimpulan

Komitmen Tata kelola kolaborasi penyelenggaraan Program Transformasi Perpustakaan merupakan komitmen serta kerjasama yang dijalin oleh pemerintah pusat juga daerah. Proses komitmen tata kelola kolaborasi dilaksanakannya Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) ini adalah rendahnya indeks literasi di Indonesia yang memiliki pengaruh dari tingkat indeks literasi di setiap daerah, sehingga perlu adanya upaya dari pemerintah untuk melakukan perubahan atas hal itu. Penyelenggaraan program tentunya membutuhkan pihak ketiga yang berasal dari swasta dan pihak terkait untuk melakukan kolaborasi. Pembentukan kolaborasi dari pemangku kepentingan juga merupakan salah satu komitmen dari pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong terlaksananya program. Setelah terbentuknya proses kolaborasi, kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan *Memorandum Of Understanding* atau (MOU) Kolaborasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dibentuknya perjanjian tersebut dimaksudkan untuk mengupayakan dan mengoptimalkan peran dan fungsi perpustakaan untuk belajar sepanjang hayat dan meningkatkan indeks literasi daerah melalui kunjungan masyarakat pada perpustakaan. Kolaborasi yang dijalin dalam penyelenggaraan program melibatkan beberapa *Stakeholders* seperti Pemerintah Kabupaten Magelang, Pemerintah Desa, Pihak swasta, Perguruan tinggi, Komunitas dan masyarakat dan Dinas Pendidikan. Kemudian masyarakat juga turut membantu penyelenggaraan program tersebut dengan berpartisipasi mengikuti Kegiatan rapat, Kegiatan pelatihan, Kegiatan senam dan pelatihan menulis di perpustakaan.

Pencapaian Dinas Perpustakaan Kabupaten Magelang terhadap komitmennya dengan pemangku kepentingan yang terlibat yaitu terbentuknya persamaan komitmen dan persepsi antar *stakeholders* untuk terus mendorong penyelenggaraan program dan Kegiatan. Pasalnya melalui Kegiatan pelatihan yang diadakan oleh perpustakaan memberikan perubahan kepada masyarakat yang mengikuti pelatihan dengan mengembangkan ilmu yang didapat dari pelatihan contohnya pelatihan pengolahan biji salah yang dimana satu peserta mampu untuk mengembangkannya dan menghasilkan penghasilan sendiri dengan menjual pengolahan biji salah sebagai kopi dan menjapatkan omset satu bulannya 1,5 juta rupiah. Namun belum semua peserta mengalami keberhasilan tersebut sehingga Dinas Perpustakaan perlu untuk mendampingi dan membimbing agar dapat mencapai hal yang sama. Hal yang bias dilakukan untuk mendorong keberhasilan pada peserta pelatihan dapat dilakukan secara rutin 2 sampai 4 kali dalam satu bulan.

Referensi

- Gutama, P. P. B., & Widiyahseno, B. (2020). Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa. *Reformasi*, 10(1), 70–80. doi:org/10.33366/rfr.v10i1.1834
- Kurniasih, R. I., & Saefullah, R. S. (2021). Inklusi Sosial Sebagai Transformasi Layanan di Perpustakaan Daerah Karanganyar. *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan*, 7(2), 149–160. doi:org/10.14710/lenpust.v7i2.34599
- Mahdi Reza, & Andi Asari. (2020). Pemberdayaan Masyarakat oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang dalam Mewujudkan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. *Jurnal PKS*, 19(3), 255–263.
- Maswakang¹, Ahmad Yamin², Z. (2023). Sistem Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Sebagai Tempat Ketiga di Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 6. https://www.researchgate.net/publication/367980750_Sistem_Pengembangan_Perpustakaan_Berbasis_Inklusi_Sosial_Sebagai_Tempat_Ketiga_di_Kabupaten_Sumbawa_Barat
- Moleong. (2005). *Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara secara dan pengamatan secara mendalam kepada para informannya*. 48–61.
- Oktariani, O., & Ekadiansyah, E. (2020). Peran Literasi dalam Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis. *Jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi Dan Kesehatan (J-P3K)*, 1(1), 23–33. doi:org/10.51849/j-p3k.v1i1.11
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2023). Peraturan Perpusatakaan Nasional Republik Indonesia No 3 Tahun 2023 Tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. *Perpustakaan Nasional*, 2013–2015.
- PT Sigma Research Indonesia. (2021). *Laporan Akhir Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 2021*. v, 211 hlm.
- Purwantini, A. H., Aziza, D. A., Kurniawan, A. B., Azizah, F. N., Utami, W. I., & Anggitasari, F. (2021). Optimalisasi Peran Perpustakaan Desa Donorojo Berbasis Inklusi Sosial Guna Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat. *Community Empowerment*, 6(3), 480–485. doi:org/10.31603/ce.4348
- Swandari, N., & Jemani, A. (2023). Pengembangan Soft Skill Peserta Didik melalui Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Studi di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Jombang). *LITERASI: Jurnal Pendidikan Guru Indonesia*, 2(2), 127–147. doi:org/10.58218/literasi.v2i2.632
- Widyawati, W., & Winoto, Y. (2022). Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial pada Rumah Baca Asma Nadia. *Al-Kuttab: Jurnal Kajian Perpustakaan ...*, October, 29–38. doi:org/10.24952/ktb.v4i1.4091